

Matriks Capaian RAN OGI B06 LKPP 2023-2024

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
1	Publikasi transaksi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog	Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi	<p>- Telah dilakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia dan Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik pada tanggal 25-27 Mei 2023. Agenda pembahasannya adalah membahas kebutuhan pengelola katalog elektronik terkait ketersediaan dashboard monev pada katalog elektronik.</p> <p>- Hasil Rapat tersebut antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan untuk dashboard yang dapat menampilkan terkait dengan perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk tayang berdasarkan jenis produknya, detail dari transaksi E-purchasing yang dilakukan oleh PPK/PP pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2) Kebutuhan dashboard ini juga diharapkan bisa disajikan secara real-time dan memiliki tampilan dashboard yang mudah dipahami oleh para pengguna, mengingat kebutuhan dashboard ini selain untuk kegiatan monitoring-evaluasi produk dan transaksi juga dibutuhkan oleh para pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. 3) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki kebutuhan untuk dapat mengunduh detail transaksi E-purchasing dari dashboard monev tersebut.
2	Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan OMS	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Hingga saat ini, informasi pengadaan darurat yang telah tersedia dan dapat dilihat pada SPSE meliputi hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai paket, 2) nilai kontrak (realisasi), 3) nilai PDN, 4) nilai UMK, 5) tanggal paket selesai, dan 6) nama penyedia

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
3	Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan bulan Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dengan sistem e-pengaduan - Menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan yang belum dapat digunakan, saat ini pada laman e-pengaduan telah diinformasikan mengenai alternatif penyampaian pengaduan melalui surat yang disertai dengan user guide persuratan e-office LKPP dan format surat pengaduan. Pengaduan yang disampaikan melalui surat selama aplikasi e-pengaduan belum dapat digunakan adalah sebanyak 84 pengaduan - Akan diadakan rapat antara Pusat Data dan Informasi LKPP, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan.
4	Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2. Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama - Hasil dari rapat tersebut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	
		B06 (2023)	Progres/Capaian B06
5	Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS	<p>- Terkait informasi yang telah dibuka dan berada di bawah kewenangan LKPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja Perencanaan PBJ melalui RUP SIRUP termasuk dashboard Profil RUP selalu terupdate secara berkala dan dapat diakses oleh publik 2) Profil Kinerja PBJ dapat diakses publik melalui tautan https://pmep.lkpp.go.id dan Laporan Pengadaan K/L dan Pemda selalu terupdate setiap minggu 3) Profil Kinerja PDN dapat diakses publik melalui tautan https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 4) Dashboard ITKP K/L dan Pemda dapat diakses melalui https://sirup.lkpp.go.id dan https://pmep.lkpp.go.id 5) Dashboard Kinerja PBJ juga dapat dimonitoring melalui AMEL yang langsung terinstall pada masing-masing LPSE <p>- Hal tersebut telah disampaikan pada rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023.</p>
		2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Terkait mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang Terkait dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi: Analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan</p>
6	Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	<p>- Telah dilaksanakan rapat Ko-kreasi dengan agenda pembahasan terkait capaian target B06 untuk ukuran keberhasilan ke-6 pada tanggal 26 Juni 2023 yang dihadiri oleh perwakilan LKPP, perwakilan ICW dan TII sebagai unsur OMS.</p> <p>- Akan dilaksanakan Ko-kreasi antara LKPP dengan ICW dan TII dalam peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa</p>

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)

Nota Dinas

Nomor : 15662/Ses.1/06/2023

Yth. : 1. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
5. Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Undangan Rapat Pembahasan Ukuran Keberhasilan ke-6 RAN OGI B06 LKPP 2023-2024

Tanggal : 19 Juni 2023

Dalam rangka pelaksanaan komitmen RAN OGI B06 Tahun 2023-2024 untuk ukuran keberhasilan ke-6 yaitu "**Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa**", dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh karena itu, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i dan/atau menugaskan narahubung RAN OGI LKPP 2023-2024 di lingkungan unit organisasi masing-masing untuk dapat menghadiri rapat bersama perwakilan ICW yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 13:30 WIB s.d. selesai
Tempat : 902 dan *Zoom Meeting*
Agenda : Undangan Rapat Pembahasan Ukuran Keberhasilan ke-6 RAN OGI B06 LKPP 2023-2024
Link Rapat : <https://us02web.zoom.us/j/84724743842?pwd=eENIWGRWc0QwMmFpRUxsTFJidDdNQT09>
Meeting ID: 847 2474 3842
Passcode: LKPP

Konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP, yaitu Sdri. Larasati Anjani melalui telepon 0857-9310-0775.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Iwan Herniwan

Tembusan :
Plt. Sekretaris Utama



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Edi Kristiyanto - Analis Kebijakan Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Setio Widodo - Perencana Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Rizky Arimawati - Widyaiswara Muda Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
4. Febrita Sidabalok - Analis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
5. Dara Kumala Arumbuana - Analis Kebijakan Muda Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
6. Ermawanto - Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biantri Raynasari - Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
8. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi - Perencana Muda Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
9. Hilma Oktaviani - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
10. Ahmad Wiza Walady - Analis Perencanaan dan Kerjasama Biro Perencanaan dan Keuangan
11. Cecep Hendar Supriadi - Analis Kebijakan Pertama Biro Perencanaan dan Keuangan
12. Fairuz Ulfa Afifah - Penyedia Jasa Lainnya - Pejabat Pembuat Komitmen(Biro Perencanaan dan Keuangan)
13. Larasati Aisyah Retno Anjani - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan
14. Christy Irmawaty - Perencana Pertama Biro Perencanaan dan Keuangan
15. Agita Marelia Ulfa - Analis Kebijakan Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
16. Budi Setyo Nugroho - Perencana Pertama Biro Perencanaan dan Keuangan
17. Mutiara Karina - Analis Perencanaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan
18. Oktrita Purwantari Rahayu - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan
19. Resa Anggriani - Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
20. Milania Pradani - Pengelola Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan
21. Ajeng Widi Hapsari - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Hubungan Masyarakat dan Umum)
22. Rachmat Taufik Usman - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Perencanaan dan Keuangan)
23. Zulfa Kamilia - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Perencanaan dan Keuangan)
24. Rosadilah Herman Putri - Penyedia Jasa Lainnya - Sekretaris(Biro Perencanaan dan Keuangan)
25. Maghfira Salsabila Muthmainnah - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional)
26. Putri Kirey Eki Yogaswari - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Perencanaan dan Keuangan)
27. Citra Destrianindya Pratiwi - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Perencanaan dan Keuangan)



Nomor : 15666/Ses.1/06/2023 19 Juni 2023
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Ukuran Keberhasilan ke-6 RAN OGI B06 LKPP
2023-2024

Yth. **Koordinator**
Indonesia Corruption Watch (ICW)
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan komitmen RAN OGI LKPP B06 Tahun 2023-2024 untuk ukuran keberhasilan ke-6 yaitu "**Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa**", dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh karena itu, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 13:30 WIB s.d selesai
Tempat : 902 dan *Zoom Meeting*
Agenda : Undangan Rapat Pembahasan Ukuran Keberhasilan ke-6 RAN OGI B06 LKPP 2023-2024
Link Rapat : <https://us02web.zoom.us/j/84724743842?pwd=eENIWGRWc0QwMmFpR UxsTFJidDdNQTO9>
Meeting ID: 847 2474 3842
Passcode: LKPP

Konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP, yaitu Sdri. Larasati Anjani melalui telepon 0813-3670-6188 atau email: larasati.anjani@lkpp.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Iwan Herniwan

Tembusan :
Plt. Sekretaris Utama LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : pBPDGe
Nomor Tiket : SK202306190007

No: 15662/Ses.1/06/2023

Tanggal: 26 Juni 2023

Tanggal Kegiatan	: Senin, 26 Juni 2023
Waktu	: 13.30 s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat 902
Judul Rapat	: Rapat Pembahasan Ukuran Keberhasilan ke-6 RAN OGI B06 LKPP 2023-2024
Pimpinan Rapat	: Resa Anggriani (Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan)
Peserta	: - Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), - Perwakilan Transparency Indonesia (TI), - Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP dan - Perwakilan narahubung RAN OGI LKPP 2023 dari unit organisasi: 1) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum; 3) Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional; dan 4) Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.

A. Pembukaan

Rapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan komitmen RAN OGI B06 Tahun 2023-2024 untuk ukuran keberhasilan ke-6 yaitu "Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa", dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Tujuan dari rapat adalah untuk berdiskusi dan menghimpun informasi terkait program/kegiatan dalam rangka pembahasan ukuran keberhasilan ke-6 untuk B06 yaitu "Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa"

B. Pembahasan

- Saat ini telah ada MoU antara LKPP dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah ditandatangani pada tahun 2023.
- MoU yang dibuat tidak menjelaskan secara rinci kegiatan yang akan dilakukan antara pihak sehingga sifatnya general dan fleksibel dalam hal pelaksanaannya.
- Selanjutnya, eincian kegiatan dalam rangka ko-kreasi, dapat diturunkan dari lima ukuran keberhasilan yang diampu oleh LKPP.
- Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh OMS, baik ICW maupun TI adalah mengadakan pelatihan terutama untuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, contohnya ketika ada potensi kecurangan, maka masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui e-pengaduan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Baik ICW maupun TI, saat ini sedang akan melakukan penguatan di 5 (lima) daerah dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan pemantauan oleh masyarakat di masing-masing daerah. Rencananya akan berkolaborasi dengan mengundang LKPP untuk mengisi kegiatan tersebut.

- LKPP sampai saat ini telah memberikan layanan pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ kepada masyarakat yaitu berupa peningkatan kapasitas UMKM dalam rangka PBJ dan telah melakukan peningkatan kapasitas kepada pelaku usaha dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar dapat masuk ke SPSE yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional.

C. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. MoU antara LKPP dengan ICW yang telah ditandatangani akan dijadikan sebagai bukti dukung capaian B06 LKPP 2023-2024.
2. Akan diadakan kegiatan ko-kreasi antara OMS, dalam hal ini ICW dan TI bersama dengan LKPP dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi kepada masyarakat sipil (baik untuk masyarakat luas maupun pelaku usaha) terutama yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dalam pengawasan.

Notulis,



Larasati A R Anjani

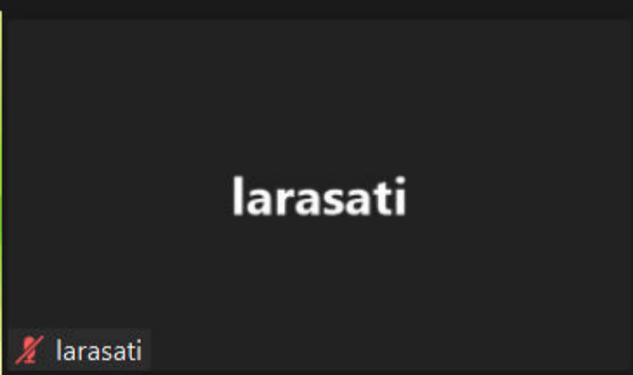
Mengetahui,



Resa Anggriani



Resa Anggriani



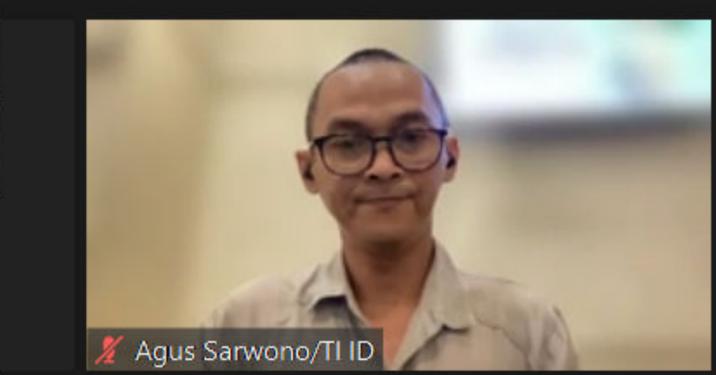
larasati



Siti Juliantari Rachman



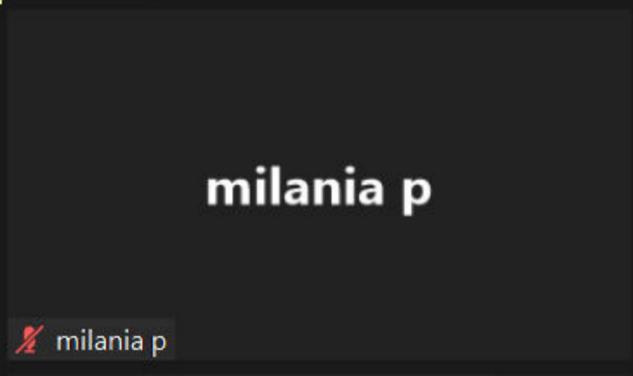
Kes Tuturoong ICW



Agus Sarwono/TI ID



Febrita Sidabalok



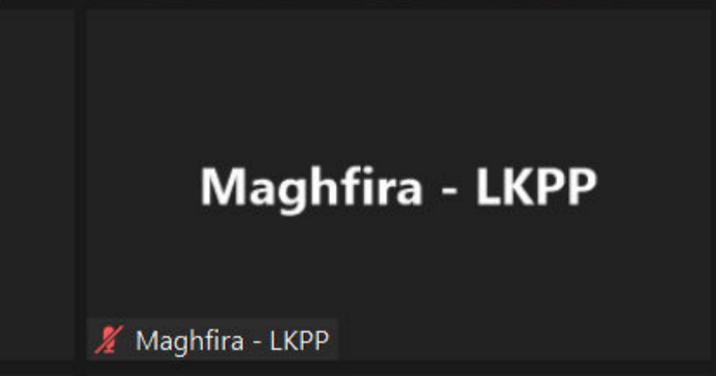
milania p



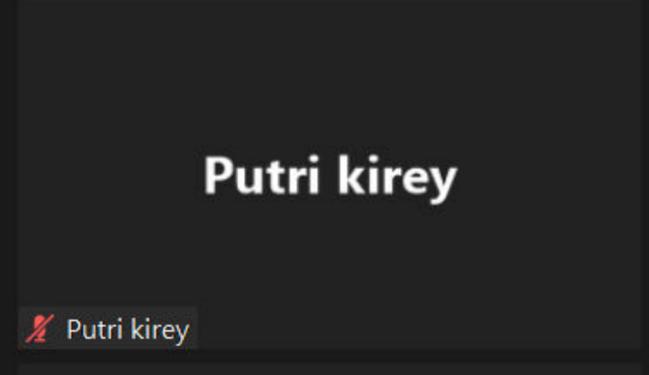
LKPP - Ajeng Widi



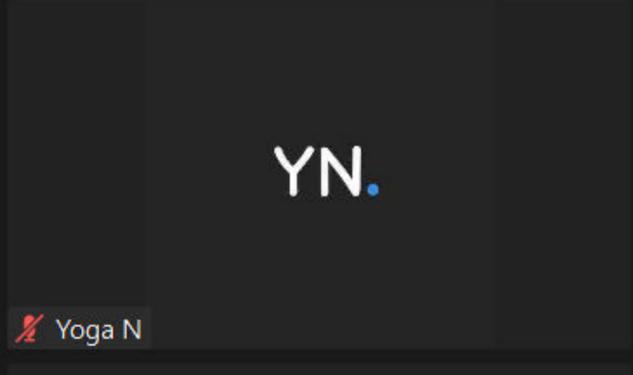
Satriyo Wibowo



Maghfira - LKPP



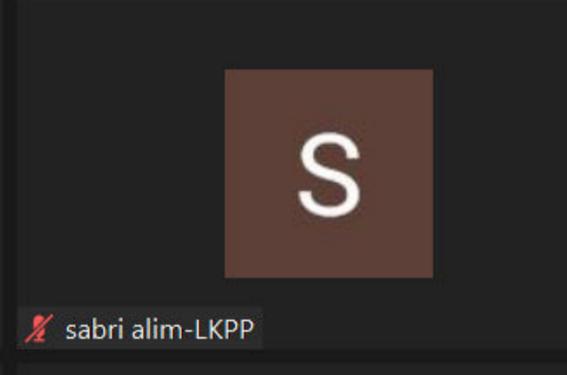
Putri kirey



Yoga N



Rachmat Taufik Usman



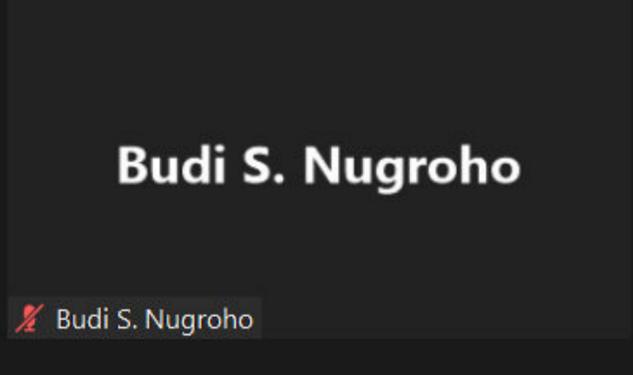
sabri alim-LKPP



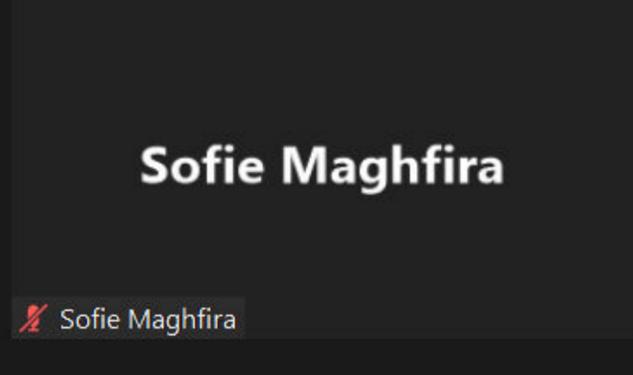
LKPP-Ivana



Fairuz Afifah



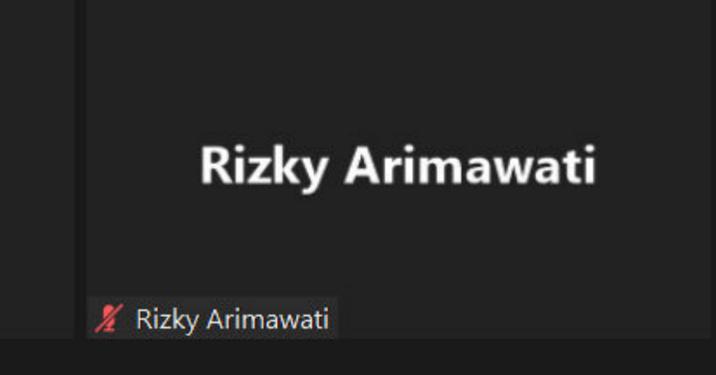
Budi S. Nugroho



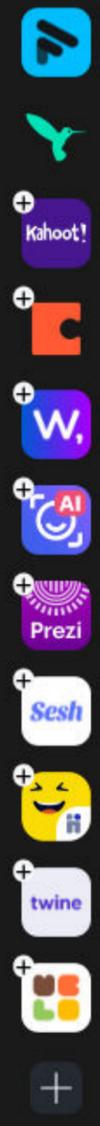
Sofie Maghfira



Rahmat Fitriadi Herman



Rizky Arimawati



Unmute Start Video Security Participants Chat Polls New Share Pause Share Annotate Remote Control Apps More

Hand Select Snapshot Clipboard Fit Page Fit Width Actual Size Rotate Left Rotate Right Reflow Edit Text Edit Object Typewriter Highlight Rotate Pages Delete Extract Scan Quick OCR PDF Sign

Tools View Edit Comment Page Organization Convert Protect

Start Matriks Tanggapan Usul...

Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Unor Terkait Penanggung Jawab	Usulan Renaksi				Kome
			B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	
	6. Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan 2. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 3. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 4. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	1. Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Keterlibatan dalam pelatihan bagi UMKM mengenai peluang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Payung Hukum atau ketentuan yang berlaku. 3. Keterlibatan dalam perumusan audit sosial mengenai peluang UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Perubahan na peningkatan pelatihan, bin FGD, dsb. 2. Pelaksanaan dapat disele (Pusdiklat dan Permasalahan dan/atau TII). 3. Dalam hal OM berupa mate pembelajaran hukum. Saat i dengan LKPP 2021 sehingga pada B06 poin

larasati

larasati



Resa Anggriani



Siti Juliantari Rachman



Kes Tuturoong ICW

milania p

milania p